

Muhammadiyah Merawat dan Meletakkan Pilar Toleransi Melalui Aksi Nyata

Senin, 23-12-2019

MUHAMMADIYAH.ID, YOGYAKARTA — Kita patut bersyukur lahir di negeri ini, juga rasanya tidak kekurangan apapun di negeri ini. Sebagai anugerah Allah SWT hidup di negeri yang masyarakatnya memiliki keragaman yang luar biasa, tapi bias bersatu menjadi sebuah *nation* yang utuh dengan segala ujian yang berliku.

Hal tersebut diungkapkan oleh Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dalam acara Media Gathering yang diselenggarakan oleh pada Sabtu (21/12) di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta.

“Dalam keberagaman dalam konteks agama yang mayoritas muslim dan berdampingan dengan agama lain, Islam hidup dalam suasana yang saling toleran dan itu kekayaan. Muhammadiyah merasakan itu, dan kita mulai membangun pilar pluralisme itu tidak hanya melalui kata-kata tapi dengan perbuatan nyata,” tutur Haedar.

Bentuk konkrit oleh Muhammadiyah dalam merawat dan meletakkan pilar toleransi tersebut melalui gerakan aksi nyata di daerah-daerah yang dikenal muslim sebagai minoritas. Menurutnya, pengikat ke-Bhinekaan yang ada di Indonesia juga terjadi karena kesepakatan bersama dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.

Sebagai ideologi yang secara konsensus diakui, Pancasila memiliki kekayaan nilai yang luar biasa. Sehingga menjadikan Pancasila sebagai titik pijak dalam mengikat segala bentuk perbedaan yang berserak menjadi satu *nations state*. Yang di dalamnya tidak bisa dilepaskan dari nilai agama, bukan hanya Islam tapi juga agama lain yang masing-masing memiliki nilai sakralitas.

“Pancasila menjadi nilai ideologis yang mengikat kita bersama, kita tidak bisa saling bersatu kalau tidak masing-masing agama tidak bisa saling menangkap nilai ini. Pancasila juga sudah terkunci sebagai komitmen nasional kita. Dalam hal ini Muhammadiyah menyebutnya sebagai *darul ahdi wa syahada*,” katanya.

Negara Pancasila dimaksudkan sebagai ideologi dasar yang mengikat, sehingga mampu menimbulkan Indonesia yang memiliki ‘nyawa’. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan lagi diletakkan sebagai cangkang yang mengurung, melainkan bangunan bangsa Indonesia yang dibawahnya ada pondasi yang berupa, pikiran, cita-cita, tujuan dan lain sebagainya.

Indonesia memiliki potensi besar dalam peta persaingan global. Modal dasar tersebut harus diolah atau dikapitalisasi, menjadi tugas negara dalam membangun Indonesia diatas pondasi dasarnya. Menjadikan Indonesai yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Menurut Haedar usaha merdeka harus tetap diusahakan, karena jika penjajahan secara fisik sudah selesai, namun Indonesia masih mengalami penjajahan dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya.

Menyoroti politik identitas, Haedar mengungkapkan tidak cukup memaknai hanya pada ruang lingkup agama. Tapi juga identitas ke daerah saat ini terjadi di Indonesia juga mulai membeku.

“Semangat keagamaan yang tinggi itu bagus, tapi ketika semangat tersebut menjadikan bentuk eksklusif

dan dalam kehidupan keberagaman tidak inklusi bagi yang lain, semangat tersebut menjadi masalah,” imbuh Haedar.

“Oligarki politik saat ini juga menjadi identitas, dimana para elite ingin bahwa seluruh kekuasaan Indonesia berada dalam cengkraman. Ini juga sebagai bentuk identitas politik,” tambahnya.

Pancasila, agama sebagai sumber luhur bangsa dan budaya sebagai sumber hidup bangsa, sehingga Indonesia dengan segala capaian dan kemajuannya tidak bisa dilepas dari *value* tersebut. Sehingga agama tidak boleh lagi disudutkan secara brutal ketika meletakkannya dalam persoalan radikalisme. Karena sifat positif yang dikandung pada setiap agama jauh lebih besar dari sifat positif yang digambarkannya.

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah kebijakan negara dalam bidang politik dan ekonomi misalnya sudah di *guiden* oleh sila keempat ini? Sehingga rakyat menjadi betul-betul sejahtera, bukan lagi menjadi kelompok kecil yang sejahtera di negeri ini. Ini harus menjadi perhatian, supaya Pancasila tidak dijadikan alat pukul bagi kelompok yang berlawanan secara ideologi dan politik,” pungkasnya.

Agama masih menjadi kekuatan yang hidup, budaya juga demikian, tetapi dalam mengkonstruksi segala itu perlu untuk dilakukan dialog secara berkesinambungan.